



RISALAH

**RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM (RDPU)
KOMISI VI DPR RI**

DENGAN

**KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA
(KADIN)**

**SEKRETARIAT KOMISI VI DPR RI
Jakarta, 11 Nopember 2009**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA

RISALAH RAPAT
KOMISI VI DPR-RI

- Tahun Sidang : 2009 - 2010
Masa Persidangan : I
Rapat ke- : 10
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
Rapat dengan : Kamar Dagang Indonesia (KADIN)
Sifat Rapat : Terbuka
Hari / Tanggal : Rabu, 11 November 2009
Waktu : Pukul 14.00 s.d. 17.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi VI DPR-RI,
Gedung Nusantara I Lt.I
Jalan Jenderal Gatot Subroto – Jakarta Pusat
- Acara : 1. Pengantar Ketua Rapat;
2. Meminta masukan untuk mendalami isu-isu yang berkembang di masyarakat terkait dengan tugas Pengawasan Komisi VI DPR-RI di bidang Perdagangan, Perindustrian, BUMN, Koperasi dan UKM, serta Investasi;
3. Tanya jawab;
4. Lain-lain
- Ketua Rapat : **Ir. H. Agus Hermanto, MM** didampingi Ketua Komisi (Ir. H. Airlangga Hartarto, MMT, MBA) dan wakil Ketua (Aria Bima, Ir. Nurdin Tampulobon).
- Sekretaris Rapat : Wahyu Prameswari, SH, M.Si. (Kabag Set. Komisi VI DPR RI)
- Hadir : A. Anggota DPR-RI :
47 dari 51 orang Anggota dengan rincian :
1. Fraksi Demokrat
13 dari 13 orang Anggota
1. Ir. Agus Hermanto, MM / Wakil Ketua Komisi VI
2. Ir. Atte Sugandi, MM.
3. Ir. Muhamad Azhari, SH., MH.
4. Yusyus Kuswandana, SH.
5. Ir. H. Azam Azman Natawijana
6. Ida Ria S., SE., MM.
7. Ferari Roemawi
8. Pasha Ismaya Sukardi
9. Dra. Lucy Kurniasari
10. Dr. Abdurrahman Abdullah
11. Linda Megawati, SE.
12. Ir. Idris Sugeng, M.Sc.
13. Jonny Buyung Saragih, SH.

2. Fraksi Golkar
9 dari 10 orang Anggota
 1. Ir. H. Airlangga Hartarto, MMT, MBA / Ketua Komisi VI
 2. Ir. H. M. Idris Laena
 3. Dodi Reza Alex Noerdin Lic Econ, MBA.
 4. Hayani Isman
 5. Ir. H. Eddy Kuntadi
 6. Gde Sumarjaya Linggih, SE.
 7. Adi Putra Darmawan Tahir
 8. Emil Abeng
 9. Drs. H. Ibnu Munzir

3. Fraksi PDI Perjuangan
6 dari 9 orang Anggota
 1. Aria Bima / Wakil Ketua
 2. Prof. Hendrawan Supratikno, SE., MBA., PhD.
 3. Eriko Sotarduga B.P.S.
 4. Sukur H. Nababan
 5. Adisatrya Suryo Sulistio
 6. Nyoman Dhamantra

4. Fraksi PKS
5 dari 5 orang Anggota
 1. H. Yan Herizal, SE.
 2. Refrizal
 3. Drs. M. Martri Agoeng
 4. Mahfudz Abdurrahman
 5. H. Mukhamad Misbakhun, SE.

5. Fraksi PAN
4 dari 4 orang Anggota
 1. Hj. Dewi Coryati, M.Si.
 2. Ahmad Mumtaz Rais, SE.
 3. Nasril Bahar, SE.
 4. Ir. Rudy Sukendra Sindapati

6. Fraksi PPP
3 dari 3 orang Anggota
 1. H. Iskandar D. Syaichu, SE.
 2. H. Mochammad Mahfudh., SH., M.Si.
 3. Nanang Sulaeman, SE.

7. Fraksi PKB
2 dari 2 orang Anggota
 1. Mirati Dewaningsih T., ST.
 2. K.H. Muhammad Unais Ali Hisyam, S.Sos.

8. Fraksi Gerindra
3 dari 3 orang Anggota
 1. Edhy Prabowo, MM.,MBA.
 2. Ir. Nuroji
 3. Abdul Wachid

9. Fraksi Hanura
2 dari 2 orang Anggota
 1. Ir. Nurdin Tampubolon / Wakil Ketua
 2. H. Sunardi Ayub, SH.

B. Undangan :
Wakil Ketua Umum Kadin beserta jajarannya

KETUA RAPAT (Ir. H. AGUS HERMANTO, MM / F-PD):

Yang kami hormati seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR-RI.

Yang kami hormati mulai dari Ketua dan saya sebut juga lebih pas mungkin dari yang pertama kali Bapak Beni Sutrisno Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Industri dan Logistik.

Kemudian Bapak Agus Silaban Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Antar Lembaga.

Yang kami hormati Bapak B.M. Kusuma Wardana, Ketua Komite Tetap Pengembangan Investasi Daerah.

Yang kami hormati Bapak Safiun, Ketua Komite Tetap Inovasi dan Produktivitas.

Yang kami hormati Bapak Natsir Mansur, belum datang ya.

Yang kami hormati Ibu Ratnasari Lopez.

Yang kami hormati Ibu Retma Gita Wiraswasta, Wakil Ketua Komite Tetap Industri Tekstil.

Yang kami hormati Bapak Sandiaga S. Uno.

Baik, dan yang kami hormati Bapak/Ibu sekalian serta hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan karuniaNya sehingga hari ini kita dapat bertemu untuk melaksanakan rapat dengar pendapat umum antara Komisi VI DPR-RI dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin dalam Masa Sidang I tahun 2009-2010.

Bapak/Ibu sekalian yang saya hormati.

Menurut laporan dari sekretariat Komisi VI, saat ini sudah dihadiri 27 Anggota Komisi VI DPR-RI dari 51 Anggota Komisi VI DPR-RI yang terdiri lebih dari separo unsur fraksi, dengan demikian sebagaimana ditentukan oleh Pasal 245 ayat (1) Tata Tertib Dewan telah terpenuhi, maka dengan ucapan *Bismillaahirrahmaanirrahiim*, rapat saya buka dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 14.10 WIB)

Bapak/Ibu Anggota Komisi VI DPR-RI, dan
Bapak/Ibu dari Kadin yang kami hormati.

Saya atas nama Komisi VI DPR-RI, pada kesempatan yang berbahagia ini mengucapkan terima kasih kepada Wakil Ketua Umum Kadin beserta seluruh jajarannya atas kesediaan waktunya untuk dapat memenuhi undangan Komisi VI DPR-RI guna menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum pada hari ini. Rapat Dengar Pendapat Umum dengan KADIN hari ini adalah sesuai dengan keputusan Rapat Intern Komisi VI pada tanggal 27 Oktober 2009.

Bapak/Ibu sekalian yang kami hormati.

Tentunya Kadin sebagai wadah dunia usaha diharapkan bisa memberikan masukan kepada Anggota Komisi VI DPR-RI tentunya nantinya dalam rangka juga meningkatkan kinerja dan juga dalam rangka meningkatkan seluruh daripada apa yang kami ketahui yang terkait dengan kebijakan perekonomian 5 tahun ke depan, dengan ide-ide mengenai *roadmap* pembangunan ekonomi Indonesia selama periode 2009-2014. Oleh karena itu dalam mengawali rapat pada masa persidangan pertama tahun sidang 2009-2010 Komisi VI DPR-RI mengundang Kadin guna memberikan masukan berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pembangunan ekonomi di masa depan agar ada integrasi antara kebijakan sektor finansial dan sektor riil.

Bapak/Ibu sekalian yang saya hormati.

Untuk menyingkat waktu, demikian pengantar dari kami, selanjutnya kami mohonkan penjelasan dari Wakil Ketua Umum Kadin yang selanjutnya nanti bisa ditambahkan dengan yang lain yang merupakan paparan ataupun presentasi kepada Anggota Komisi VI DPR-RI, waktu kami persilahkan.

AGUS SILABAN / WAKIL KETUA UMUM KADIN:

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Bapak-bapak, Ibu-ibu para Anggota DPR yang terhormat yang kami muliakan.

Assalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh.

Kami atas nama Kadin Indonesia mengucapkan terima kasih atas undangan yang telah disampaikan kepada kami dalam rangka Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Kadin sesuai dengan bidang yang dibawah oleh Komisi VI. Pada saat ini dari Kadin selain diwakili oleh saya sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Antar Lembaga, ada dua wakil ketua umum yang membidangi substansi yang akan dibahas yaitu di sebelah kanan saya Pak Beni Sutrisno dalam bidang perdagangan dan logistik, sebelah kiri saya Bapak Sandi Uno di dalam bidang UMKM. Untuk WKU yang lain Waketum-Waketum yang lain yaitu Saudara Rahmat Gobel untuk industri riset dan teknologi, demikian juga dengan Saudara Chrys Canter untuk dibidang investasi karena yang bersangkutan memang ikut rombongan ke APEC Pak di Singapura, jadi mungkin apa yang bisa kami jawab nanti akan kami jawab. Kami juga membawa beberapa *stakeholder* asosiasi seperti misalnya dari Industri makanan Bapak Thomas Darmawan dari GAPMI, demikian juga dari Tepung Terigu tadi sudah diperkenalkan Ibu Ratnasari Lopez. Mungkin demikian Pak sekedar pengantar dari kami.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih pada pengantarnya yang telah disampaikan dari Wakil Ketua Umum Kamar Industri dan Dagang Indonesia.

Selanjutnya kami persilahkan untuk dilanjutkan apabila tentunya dan pasti diperlukan paparan-paparan kepada Anggota Komisi VI DPR-RI, waktu kami persilahkan Pak.

BENI SUTRISNO / KADIN:

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Bapak Pimpinan yang saya hormati, dan

Anggota DPR yang saya hormati.

Mungkin saya mewakili sekaligus kawan saya yang berhalangan yaitu Rahmat Gobel di dalam bidang industri dan saya sendiri diberi tanggung jawab oleh Ketua Umum untuk bidang perdagangan, logistik serta distribusi.

Berangkat dari *roadmap*-nya Kadin bahwa visi daripada Kadin itu sendiri yaitu ada 3 visi mengenai industri dan perdagangan, yaitu kebangkitan kekuatan rekayasa atau rancang bangun manufaktur dan jaringan penjualan produk industri nasional terutama untuk menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas untuk di wilayah Asia. Kedua, kebangkitan industri nasional mengolah dari sumber daya alam dengan produk olahan bermutu, terjamin, sehingga dicapai swasembada pangan serta lestari dan kemampuan untuk ekspor. Yang ketiga, adalah kebangkitan dari cipta dan kreativitas rekayasa rancang bangun yang berdasarkan basis budaya. Jadi ada 3 visi yang kalau di Kadin kita sebutnya visi 2030 dan *roadmap* 2015, karena kita menganut sistem pemerintahan 5 tahunan.

Nah untuk mewujudkan visi tersebut, ada 3 misi utama yaitu berangkat dari 3 point, yaitu pertumbuhan ekonomi 1 tahunnya rata-rata hampir 7%, kedua adalah peningkatan daya saing produk industri nasional dan ketiga penciptaan lapangan kerja serta pengentasan kemiskinan. Dengan mewujudkan misi tadi kita menggunakan 3 kegiatan strategis, yaitu restrukturisasi industri nasional, yaitu peremajaan mesin dan peralatan untuk meningkatkan produktivitas. Kedua, reorientasi kebijakan ekspor bahan mentah. Ketiga, integrasi pasar domestik untuk memperkuat basis industri nasional sebelum masuk ke dalam pasar regional dan pasar global. Dengan secara sistematis dan bertahap konsisten melaksanakan secara strategis ada 6 kelompok prioritas implementasi atau tindakan nyata dengan berbagai insentif bagi industri nasional. Kita fokus pada 10 cluster industri unggulan. Unggulan itu kita bagi 3, yaitu unggulan pendorong pertumbuhan ekonomi yang pertama, kedua unggulan pendalaman struktur industri, ketiga adalah unggulan sumber penerimaan devisa.

Pertama saya ingin membahas unggulan pendorong pertumbuhan ekonomi. Dari unggulan pendorong pertumbuhan ekonomi yang kita pilih pertama adalah industri makanan dan minuman, kedua adalah industri tekstil dan produk tekstil serta alas kaki, ketiga industri elektronika dan komponen elektronika, ke empat industri alat angkut dan komponen otomotif. Ini yang unggulan pendorong pertumbuhan ekonomi. Yang selanjutnya unggulan pendalaman struktur industri, yaitu kita pilih yaitu industri alat telekomunikasi dan informatika, kedua adalah industri logam dan dasar mesin, ketiga adalah industri petrokimia. Yang terakhir adalah unggulan sumber penerimaan devisa yaitu industri pengolahan hasil pertanian, peternakan dan kehutanan, industri pengolahan hasil laut dan kemaritiman dan industri tradisi dan budaya. Ini *cluster-cluster* daripada yang kita pilih.

Mungkin *software*-nya sudah kita kirimkan, jadi mudah-mudahan Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian akan atau sudah mendapatkan *software* itu masing-masing, karena cukup panjang tapi maaf saya akan coba bahas berangkat dari *National Summit* yang baru saja kita lakukan bersama-sama dengan pemerintah yaitu membahas yang 100 hari dan yang 5 tahunan. Itu kalau kita bagi dalam berapa isu yaitu ada 12 isu. Yang pertama, mungkin untuk industri yaitu kalau industri apapun selalu *rule of term*-nya adalah energi, energi dalam hal ini khususnya energi listrik yang akhir-akhir ini kita agak kekurangan. Jadi yang pertama adalah kendala dan harapan, keduanya adalah masukan serta waktu yang harus diselesaikan.

Di dalam energi, listrik sangat kurang tersedianya serta tarifnya tidak rasional, artinya konsumsi lebih murah daripada produksi, artinya kegunaan untuk dikonsumsi dan kegunaan untuk konsumsi produktif lebih mahal yang di produktif. Lalu membeli banyak lebih mahal dibandingkan membeli sedikit. Kita minta di rasionalisasikan harganya, dengan harapan ketersediaan pasokan listrik bagi industri dengan harga yang sangat kompetitif, karena kita bandingkan dengan Korea Selatan, Korea Selatan itu harga listrik untuk industri hanya 6 sen kilowatt per *our* dan flat, artinya apa yang dipakai itu yang dibayar. Sebenarnya kita dari 6 sampai 13 sen per kilowatt *our*. Nah kita sudah memberikan masukan bahwa penambahan kapasitas pembangkit listrik itu adalah 5.000 megawatt per tahun, dan di dalam jangka waktu 3 tahun. Yang kedua, adalah kebijakan gas dan batu bara diutamakan untuk kebutuhan di dalam negeri yaitu untuk membangkitkan listrik yang selama ini PLN kekurangan batu bara, tapi batu baranya diekspor. Nah kita minta di dalam waktu 1 tahun diselesaikan karena di dalam kabinet bersatu jilid I sudah ada janji, tapi janjinya wongnya janji tidak ada waktu itu, mau berapa tahun. Nah kalau sekarang kabinetnya kan jilid II janji lagi, setahun kita minta setahun. Ketiga, menurunkan biaya produksi listrik melalui perbaikan sistem pembelian gas dan batu bara, seperti yang telah saya sebutkan tadi. Yang keempat, mungkin kita setuju semua yaitu perbaikan kinerja PLN agar frekuensi *blackout*-nya diminimalisir hingga sedikit mungkin kalau 0 % pasti tidak mungkin. Selanjutnya adalah perbaikan kinerja Perusahaan Gas Negara agar *supply* tekanan gas ke industri tetap stabil dan selanjutnya adalah soal listrik lagi yaitu penghapusan tarif daya maks multiguna dan pajak penerangan jalan umum, perubahan paradigma kehutanan tidak hanya masalah *deforesstrasi* tapi juga sebagai sumber energi terbarukan yang namanya *green energy*.

Saya meloncat kalau setelah energi tentunya itu saya mengistilahkan *power*, yang selanjutnya adalah *man power*, karena industri tanpa *man power* juga tidak bisa jalan sendiri yaitu kendalanya adalah aturan ketenagakerjaan yang saat ini Undang-Undang 13 yang oleh kedua belah pihak baik kita sebagai pemberi kerja maupun penerima kerja ditolak, artinya tidak disepakati, tapi sudah menjadi undang-undang, karena dulu juga disepakati di tingkat pemerintahan. Nah harapannya tentu aturan itu direvisi atau undang-undang itu direvisi untuk ditinjau kembali, tentu isinya jangan banyak yaitu penghapusan upah minimum sektoral dan regional, perubahan minimum dilakukan 2 tahun sekali, dan diserahkan kepada forum *tripartit* tingkat perusahaan. Lalu mendorong sertifikasi kompetensi profesi dengan dukungan insentif, karena sampai saat ini tenaga asing dikenakan IWPL (Iuran Waji Pelatihan) tapi dana itu tujuannya adalah untuk menggantikan tenaga ahli dari asing jadi lokal, hanya tujuannya sampai saat ini masih belum terpenuhi, dan kita juga tidak tahu akuntabilitas dana itu kita belum tahu sampai dimana, itu ditariknya 1 tahun 1 kali di depan. Perlindungan tenaga ahli di dalam negeri dari pembajakan perusahaan asing. Akhir-akhir ini teman-teman kita di industri yang cukup *skill*, membutuhkan *skill*, banyak tenaganya yang lari keluar, ini bukan TKI ini *skill*, sehingga kita kekurangan sekali tenaga *skill* khususnya di perminyakan. Kita juga meminta yaitu insentif fiskal itu potongan IWPL 5% bagi perusahaan yang mengadakan pelatihan karyawannya sendiri. Setelah *man power* atau tenaga kerja, kita mengajak ke infrastruktur khususnya untuk transport. Kendalanya arus barang dan bahan baku tersendat dan *high cost economy*, sehingga biaya tidak bersaing, ini di tingkat pelabuhan maupun di jalan. Harapannya efisiensi arus barang dan bahan baku cepat dan biaya bersaing. Tentu pointnya cukup banyak yaitu kita ambil saja yang intinya saja, yaitu pelabuhan-pelabuhan laut yaitu Tanjung Priok, Cirebon, Tanjung Mas, dan Tanjung Perak menjadi pelabuhan internasional, menambahkan kemampuan bongkar muat dari 20 box menjadi 50 box, dan penambahan kapasitas tampung 1 juta *teus* pertahun dan akses jalan menuju ke pelabuhan itu, nah ini dalam 3 tahun kita mintanya.

Yang di depan mata sebenarnya yang mudah yang kita minta 100 hari yaitu biaya penurunan *Terminal handling charge* dari 95 dollar menjadi 60 dollar per 20 *feet* atau per *teus*, dan dari 145 dollar menjadi 90 dollar untuk 40 *feet*. Kita *bench marking* di Pelabuhan Thailand yaitu hanya 62 dollar per *teus* per 20 *feet* dan 85 dollar untuk yang 40 *feet*. Ini kita minta dalam 100 hari bisa diselesaikan karena ini hanya pungutan iuran retribusi di pelabuhan yang masih perlu dijelaskan untuk apa itu, dan kenapa harus pakai dollar, mungkin di Asia yang pakai dollar hanya kita dengan Vietnam, yang lain semuanya pakai *local currency*. Yang ketiga, adalah pembangunan *Train port* dan transportasi kereta api container antara sentra

industri dan pelabuhan. Pada jaman dulu kalau dari jaman Belanda dulu dari Gedebage sampai ke Tanjung Priok itu sampai sekarang masih ada relnya, artinya container bisa sampai ke lambung kapal, kalau di Jawa Tengah dari Solo sampai ke Tanjung Mas, kalau di Jawa Timur dari Malang sampai ke Tanjung Perak, tapi akibat dari saya melihatnya ada *rent seekers* di situ, sehingga kita itu tidak jalan lagi, sehingga harus pakai harus jalan, memang ongkosnya jadi tambah. Selanjutnya me-review atau *simplifikasi* prosedur dan aturan untuk memperjelas aturan main di pelabuhan, untuk mengurai pemeriksaan dan pungutan ganda, ini yang kita sering sebut *soft infrastructure* artinya tidak ada investasi tapi kalau kita ada mau, tentu kita bisa melakukan dan mendapatkan efisiensi. Harapan lain adalah membuka pelabuhan baru tentu. Selanjutnya me-review aturan mengenai keharusan pemindahan galangan kapal dari area pelabuhan. Biasanya galangan kapal itu selalu *in built* dengan pelabuhan, karena galangan kapal tidak harus membuat kapal, galangan kapal juga bisa memperbaiki merepair kapal. Nah sekarang ada aturan main galangan kapal harus keluar dari pelabuhan. Selanjutnya adalah terkait dengan asas *Cabotage*, harus ada keberpihakan terhadap produksi dalam negeri, perlu adanya ketentuan pembatasan, boleh impor kapal bekas namun dengan perbandingan impor produksi dalam negeri secara bertahap harus semakin mengecil. Ini juga adanya di kebijakan fiskal, karena kebijakan fiskal kita kalau di Batam bikin kapal menjual keluar, lalu diimpor ke dalam di luar Batam, tapi di Indonesia itu lebih murah dibandingkan kita membuat kapal di galangan Surabaya misalnya.

Yang terakhir untuk infrastruktur yaitu adalah operasi seluruh pihak yaitu di pelabuhan agar bisa beroperasi 24 jam sehari atau 7 hari dalam 1 minggu, karena di pelabuhan itu yang beroperasi tidak hanya otoritas pelabuhan tetapi juga ada pihak yang lain yaitu kepabeanan. Kalau mereka Sabtu-Minggu libur sehingga ada 2 hari hilang.

Yang Nomor empat, adalah bank atau pendanaan, tanpa dana saya kira pertumbuhan ekonomi juga tidak akan jalan, kendalanya adalah akses permodalan terbatas ya mengenai fungsi intermediasinya. Bunga juga cukup tinggi yaitu saat ini 14-20 % membuat tidak bersaing. Harapannya adalah akses permodalan terbuka, bunga diharapkan bisa sekitar 8%, ada perbankan lembaga khusus keuangan untuk pengembangan industri. Ada beberapa hal yang sudah dibuat di sini adalah pembatasan dana bank di SBI maupun di obligasi bank pemerintah, sementara industri dan perdagangan itu membutuhkan dana *no trade finance* kalau tidak ada *trade finance* tentu *trade*-nya juga tidak ada, tapi sekarang berlomba yang memperebutkan dana ini yaitu pemerintah juga berebut itu dana, lalu banknya juga mau aman saja itu masuk SBI, sehingga kelangkaan dana ini yang sangat dirasakan. Kita mengusulkan adanya perbankan atau lembaga keuangan yang khusus untuk membiayai industri. Selama ini bank semuanya sama kalau kita lihat di beberapa negara ada bank industri, ada bank konstruksi, ada bank pertanian, kalau kita semua bank semua sama, sehingga elastisitas usaha itu memang bermacam-macam. Lalu dengan lembaga yang baru yaitu LPEI yaitu Lembaga Pembiayaan Ekspor, ini sangat kita harapkan operasionalnya segera dioptimalisasi, karena ini harapan kita satu-satunya untuk mendorong ekspor tanpa harus mengikuti aturan perbankan, aturan BI, sehingga yang dilakukan adalah *underlying* transaksi, kalau ekspornya itu kredibel tentu harus dibiayai tanpa melihat aturan bank yaitu neracanya bagus tidak, jaminannya cukup atau tidak, tapi yang penting *security* daripada bisnisnya harus ada. Tentu nanti akan dibahas oleh rekan saya yaitu Sandi, yaitu kebijakan pemberian kredit untuk usaha mikro, yang selanjutnya adalah kebijakan untuk mendorong penggunaan pemerintah untuk transaksi di dalam negeri. Sebenarnya undang-undang ini ada, tetapi kita senang sekali menggunakan denominasi dollar jadi lebih gagah kelihatannya, mungkin nyimpannya lebih sedikit, ini sebetulnya melanggar undang-undang sebetulnya ini, artinya mendorong orang mencari dollar untuk melakukan transaksi. Yang terakhir ini adalah kebijakan keharusan menyimpan devisa hasil ekspor di dalam negeri untuk menjaga stabilitas rupiah, ini usulan kita bukan merubah sistem devisa tetapi membuat aturan repatriasi hasil ekspor yang selama ini kebanyakan perginya keluar, khususnya yang besar-besar yaitu pertambangan.

Yang Nomor lima, adalah masalah investasi, ini masih ada satu pengurusan ijin yang lama, tarif biaya masuk yang tidak harmonis, yaitu lebih murah biaya masuk barang jadi dibandingkan barang baku, itu tidak akan mendorong investasi baru. Ini justru programnya sangat krusial kita letakkan di dalam waktu 100 hari. Harapannya adalah mengimplisifikasi prosedur pengurusan ijin dan harmonisasi tarif. Harmonisasi tarif biaya masuk hulu dan hilir. Biaya masuk semestinya sebagai instrumen pengembangan industri untuk menarik investasi dan bukan hanya untuk mendapatkan penerimaan negara. Percepatan proses memulai usaha dari 60 hari menjadi 40 hari, dan sistem pelayanan informasi perijinan investasi secara elektronik dan terpadu di satu pintu dan saya tambahkan satu meja kalau bisa. Ketiga, adalah promosi BKPM untuk menarik *foreign direct investment* dilakukan dengan pendekatan sektoral dan terintegrasi dengan keunggulan masing-masing daerah ini tentunya. Yang terakhir untuk investasi adalah pembentukan Tm Pokja Kebijakan Insentif. Investasi tidak akan jalan kalau tidak ada insentifnya.

Yang ke enam perpajakan. Perpajakan di sini ada satu kendala yaitu sistem perpajakan kurang fair dan tidak *bussines friendly*. Nah harapannya tentu sistem perpajakan yang lebih fair dan *bussines friendly*. Ada beberapa hal yang cukup detil, saya kira yang paling krusial itu adalah restitusi PPN yang dulunya sudah lebih maju, lebih awal, sekarang RUU yang sudah diketok akan menjadi undang-undang, sekarang malah lebih mundur, jadi 1 tahun sekarang, itu yang paling krusial untuk eksportir tentunya.

Yang lain cukup banyak bisa dilihat nanti dan dibaca di *software*. Kalau untuk kepabeanan, menurut kami sistem kepabeanan masih rumit dan kurang transparan menghambat kelancaran arus barang. Nah harapan tentunya sistem kepabeanan ini disederhanakan dan transparan tidak menghambat kelancaran arus barang.

Ada beberapa hal yang kita inginkan yaitu *me-review* prosedur pemeriksaan bea cukai agar tidak terjadi pemeriksaan ganda atau yang sering disebut Notul (Nota Pembetulan), yaitu dengan melalui percepatan pemberlakuan *national single window* tentunya.

Point-pointnya cukup saya lewatkan saja dan yang saya ingin jelaskan ke Bapak/Ibu sekalian yaitu mengenai pasar. Pasar ini sangat menarik sekali, tanpa pasar kita juga tidak akan bisa tumbuh. Ada masalah yaitu penetrasi pasar lemah akibat *unfair trade* harapan tentunya *fair trade* di pasar ekspor maupun domestik. Di dalam hal ini saya akan mengungkap pasar ekspor dulu, banyak hal yang kita lakukan yaitu melakukan *free trade agreement*, baik itu regional kita ASEAN dengan negara yang lain, maupun bilateral Indonesia dengan negara yang lain. Mungkin kalau di bawah payung ASEAN, saya bisa sebutkan Indonesia sudah bikin *free trade agreement* dengan China, *free trade agreement* dengan Korea Selatan, *free trade agreement* dengan Jepang, *free trade agreement* dengan Australia dan New Zealand yang akan yang sudah kita tandatangani tahun lalu. Lalu yang sudah ditandatangani Oktober kemarin *free trade agreement* dengan India, dan nanti *free trade agreement* dengan Pakistan dan masih dalam joint study yaitu dengan Turki dan Eropa. Nah *Free trade agreement* ini tujuannya itu bagus yaitu agar akses pasarnya besar. Tetapi kita tidak pernah mempersiapkan diri kedalam, kalau itu sudah berlaku apakah kita juga bisa menjaga fasilitas didalam. Nah ini yang kadang-kadang kita senang sekali menandatangani *Free trade agreement* tanpa melihat efek apa *free trade agreement* terhadap fasilitas didalam negeri. Sebagai gambaran tentu saya akan mencoba memberikan data bahwa selama *free trade agreement* dengan China semakin hari semakin minus perdagangan kita. Menurut yang saya ketahui bahwa neraca pembayaran kita yang mendukung hanya 2, surplus perdagangan barang dan surplus perdagangan jasa-jasa. Sementara surplus perdagangan jasa-jasa tidak pernah surplus, selalu minus sejak Rejim Soeharto sampai sekarang. Yang mendukung hanya surplus perdagangan barang. Kalau surplus perdagangan barang semakin menurun, saya rasa neraca pembayaran siapa yang akan membayar, karena yang hutang pun sudah banyak sekarang. Nah ini yang perlu kita sikapi mengenai FTA. Kita meminta Menteri Perdagangan untuk melakukan, *me-review* kembali FTA itu, artinya setiap perjanjian tentu ada klausul untuk *me-review*.

Lalu Undang-Undang Perdagangan sendiri yang sampai saat ini menurut saya masih belum terlihat undang-undang itu, setahu saya menurut pak Lili undang-undang ini masih pakai undang-undang Belanda, statblad ordonansi 1938, diperbaharui tahun 1947 kalau tidak salah. Yang mengatur perdagangan barang pasar domestik itu dengan pengawasan barang beredar masih belum baik.

Lalu sebetulnya percepatan SNI itu merupakan *non trade barrier* yang bisa melindungi pasar kita. Pasar Indonesia cukup pasar besar dengan 240 juta cukup besar, dan pasar regional kita Asean, yaitu kurang lebih sekitar hampir 600 juta, itu sama dengan separuh penduduk China, jadi pasar ini cukup besar. Jadi kita lihat bukan sebagai sources tetapi juga sebagai pasar.

Kita juga mendorong Inpres No. 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Penggunaan Produksi Dalam Negeri, ditetapkan secara konsisten, selama ini *government spending* ada beberapa yang sebetulnya barangnya sudah bisa didapat didalam negeri juga masih impor, lalu kita menginginkan peningkatan kualitas sumber daya manusia, di Komite Anti Dumping dalam mengadopsi aturan WTO untuk melindungi produk Indonesia. Saya mengusulkan Komite Anti Dumping itu kalau di Brazil dan Turki, namanya Trade Deffenced Komite. Jadi yang dilihat bukan anti dumpingnya saja tetapi Deffenced, trade-nya Deffenced terhadap serangan-serangan barang dari luar. Jadi lebih luas lagi, artinya aturan WTO bisa masuk semua, yaitu anti dumping. *Countervailing duty* maupun *safeguard*.

Yang ke sembilan, adalah bahan baku atau struktur industri, yaitu kita ada masalah industri hulunya lemah, bahan baku dan bahan penolong terbatas, kurang terintegrasinya dan kurang harmonisnya tarif seperti yang diatas tadi. Harapan kita adalah integrasi industri hulu dan hilir yang kuat sehingga tercipta produk ekspor yang berdaya tambah tinggi, bahan baku dan barang modal yang tersedia dengan harga yang bersaing. Memang kita masih lemah di industri hulu kimia, lalu industri hulu besi, yang semuanya itu adalah industri dasar semua. Tentu ada beberapa hal yang kita inginkan yang diselesaikan didalam 100 hari yaitu yang pertama, menghapus hambatan importansi mesin bekas untuk pengolahan

sendiri oleh perusahaan industri yaitu untuk merevisi Keputusan Menteri Perdagangan, lalu penetapan barang ekspor untuk produk-produk mentah, lalu membuka impor plastik resin dan scrab Plastik untuk kegunaan packing dan meninjau kembali kebijakan *ekspor scrab* logam dan rotan, selama ini rotan diekspor tetapi industri meubelnya susah cari rotan, padahal rotannya diekspor. Lalu pembebasan PPh atas bahan baku perak dan *crumb rubber sheet* dan *creed*, ini jadwal 100 hari yang lainnya untuk di bahan baku, kita memberikan jadwal paling banyak untuk industri itu 3 tahun, paling cepat 100 hari dan paling middle 1 tahun.

Yang kesepuluh, teknologi, kendalanya adalah kelangkaan inovasi dan pengembangan produk, harapannya adalah kreatifas inovasi pengembangan produk dan kemampuan alih teknologi akan meningkat, yaitu dengan, tentu dengan penyediaan anggaran riset development yang lebih besar dibandingkan tentu harus membuat *bench marking*, lalu memberikan insentif potongan PPh 5% bagi perusahaan yang melakukan R & D dan mensinergikan penelitian balai dan penelitian-penelitian industri agar risetnya dapat dimanfaatkan. selama ini kita lihat riset harus didukung dengan riset dan dilanjutkan dengan riset kembali tidak pernah kita implementasikan.

Untuk balai penelitian dan pendidikan bersama industri melakukan fungsi alih teknologi atas teknologi terbaru yang dibutuhkan industri khususnya untuk PMA, seperti dalam pengembangan industri permesinan, alat produksi yang mencakup teknologi bahan metalurgi, rekayasa dan rancang bangun dan manajemen industri. Yang kesebelas, adalah kawasan dekonomi, yaitu KEK yang sampai saat ini belum terselesaikan, Batam sendiri juga belum. Harapan kita adalah bisa diselesaikan secara cepat yaitu khususnya untuk Batam dan KEK yang dengan segala aturan mainnya.

Yang terakhir adalah titipan dari pariwisata, karena pariwisata ini adalah salah satu untuk mengurangi atau barangkali membuat surplus perdagangan jasa-jasa kita terjadi. Karena jasa minus itu sekolah keluar negeri kita juga bayar, lalu konsultan kita juga bayar, termasuk mungkin naik haji juga bayar, berobat ke luar negeri kita bayar. Nah lawannya itu adalah pariwisata sebetulnya. Sebetulnya pariwisata kita adalah alam yang kita miliki, tinggal pemerintah memberikan satu aset infrastruktur menuju situ. Kebetulan saya punya usaha satu pariwisata yang ditempat remote tergantung kepada penerbangan yang disubsidi oleh pemerintah daerah itu, kalau penerbangannya tidak jalan ya tutup.

Jadi infrasutrktur pariwisata ini sangat diharapkan. Mengenai destinasi banyak sekali dan potensi budaya kita sangat kaya, tentu kita mempunyai harapan yaitu tambahan kemudahan bagi wisatawan dengan memberikan satu senyum di imigrasi kita, kalau lihat diimigrasi kita kurang senyum dan mejanya sedikit kalau ada praktek-praktek yang belok kanan langsung keluar, itu sebenarnya memalukan sekali. Seharusnya hanya menambah meja, menambah orang, sebenarnya dengan menambah senyum sudah salah satu menunjang pariwisata kita. Tentu kita memohon ada insentif potongan PPh lagi untuk perusahaan yang melakukan pelatihan di pariwisata. Banyak hal yang bisa disatukan yang set kita tulis itu, bapak bisa lihat misalnya *visa on arrival* bisa diproses dipesawat, mungkin hanya berangkat dari beberapa negara, bisa kita mulai dari Jepang dulu barangkali atau dari Taiwan, Korea, sehingga mudah sekali.

Bapak Ketua yang saya hormati; dan

Anggota DPR RI yang saya banggakan

Saya kira presentasi saya cukup sekian nanti akan disambung oleh kawan saya yang lain yaitu Sandi Uno

KETUA RAPAT :

Silakan pak diteruskan

SANDIAGA UNO / KADIN :

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera bagi ktia semua

Bapak Pimpinan Rapat dan juga seluruh Anggota Komisi VI DPR-RI yang terhormat.

Bapak Ketua Komisi VI, ini bos saya Bapak Airlangga.

Kami disini diminta untuk mewakili presentasi dibidang Strategi Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM yang diusung oleh KADIN Indonesia dan kebetulan disini juga ada beberapa wakil dari asosiasi yang concern dan memang betul-betul menjadi pilar daripada pengembangan UMKM yaitu salah satunya adalah HIPMI, disini ada Saudara Novita Dewi, tapi HIPMI-nya ada disini, disitu juga kayanya ada bagian dari HIPMI. Kayanya HIPMInya banyakan disebelah sana daripada disini. Lantas ada beberapa kawan dari IWAPI (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia) yang juga betul-betul concern terhadap UMKM.

Strategi kami ini adalah rohnya itu adalah roadmap kita yang telah kita godok selama tiga bulan terakhir dan dipuncaki dalam ajang *national summit* yang baru selesai kita garap bersama-sama pemerintah dan pemangku kepentingan yang lain. Jadi kalau kita bisa mulai ini adalah Pareto UMKM Indonesia. Terima kasih atas fasilitasi daripada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 yang dilahirkan diruangan ini saya ingat sekitar satu setengah – dua tahun yang lalu, kita mendorong Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, dan berdasarkan undang-undang itu klasifikasinya sekarang sudah dilihat, dimana jumlah usaha mikro, kecil dan menengah itu sudah berada di angka 99,9% daripada seluruh unit usah di Indonesia. Dimana jumlah usaha mikronya adalah lebih dari 50,7 juta, dimana itu mencakup 98,9%. Nah disini ada satu kekhawatiran karena mulai tahun 2000 sampai 2008 kemarin jumlah unit usaha mikro itu naik dari 95% ke 98,9%. Kenapa dia naik usaha mikro, bukan karena mereka tumbuh, karena terbitnya peluang sebagai pengusaha tapi karena keterpaksaan, karena keterpurukan, karena ketidak tersedianya lapangan kerja. Akhirnya usaha mikro ini tumbuh dengan sendirinya menjadi *class resource* atau *necessity employment*. Dimana sebetulnya usaha mikro ini tidak lahir secara natural karena terbitnya atau timbulnya suatu peluang. Kami di KADIN sangat percaya bahwa paradigma kebanggaan kita yang selalu menyatakan jumlah UMKM kita diseluruh Indonesia meningkat karena angkanya 50 juta itu adalah salah paradigma itu. Justru kita harusnya prihatin bahwa UMKM kita itu tumbuh dan banyak itu karena kita tidak bisa menyediakan lapangan kerja. Berdasarkan hal-hal tadi yang sudah disebutkan oleh Bapak Benny Sutrisno yang secara rinci menyatakan kesulitan bagaimana industri itu bisa bertumbuh kedepan.

Berikutnya, ini sedikit mengingatkan, kontribusi daripada UMKM di Indonesia dalam menyerap tenaga kerja 97,1%. Slide berikutnya, dalam menyerap tenaga kerja 97,1% itu bermuara di UMKM, kontribusi terhadap PDB cukup signifikan yaitu hampir 60% nilai investasinya sekitar 53% dan penciptaan devisa sekitar 20%. Jadi memang UMKM ini telah menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia dan selama ini bisa tumbuh tanpa ada suatu kebijakan yang betul-betul berpihak kepada mereka. Jadi ini menjadi tanggungjawab kami dan kami soroti betul di KADIN bahwa kedepan 5 tahun dengan program yang kita susun kemarin juga ownership-nya ditingkatkan baik oleh pemerintah maupun oleh pemangku kepentingan yang lain sehingga harapan kami strategi pemberdayaan UMKM 5 tahun kedepan itu bisa lebih mendarat dan lebih menghasilkan bukan jumlah UMKM yang menjadi 60 juta 5 tahun lagi, tetapi menjadi paling tidak berkurang 5 sampai 10 juta untuk usaha mikro. Mereka akan naik kelas dari usaha mikro menjadi usaha kecil, usaha kecil menjadi usaha menengah dan usaha menengah insya Allah menjadi usaha besar.

Inti daripada strategi pemberdayaan dan pengembangan UMKM itu adalah pemisahan kebijakan antara usaha mikro dan usaha kecil menengah. Jangan dipukul rata karena kebijakan untuk mengembangkan industri *handycraft* di Jogja tidak sama seperti mengembangkan kemampuan daripada pedagang kaki lima di Mayestik misalnya di Jakarta Selatan. Jadi kita sudah harus lepas daripada suatu pemahaman bahwa seluruh usaha mikro kecil menengah itu dipukul rata dalam hal pemberdayaan dan pengembangan setrateginya lima tahun ke depan. Dengan pengembangan yang dipisah antara mikro, kecil dan menengah lebih terarah dalam pengembangan mereka. Usaha mikro ini adalah keberpihakan dan pemberdayaan, sumbernya melalui *micro financial* atau kredit mikro, sedangkan kecil menengah adalah melalui peningkatan kapasitas, revitalisasi KUR, dan tentunya mengasubkan inovasi dan teknologi dalam proses produksi usaha kecil dan menengah.

Berikutnya sedikit saya ingin *outline* lima tahun ke depan, gambaran kami yang mencakup bagaimana unit mikro dan koperasi dalam strategi pemberdayaan ini bisa digagas melalui mikro financing tahun 2010, melalui persiapan membangun konsensus, kemarin kita di National Summit bicara tentang kebutuhan-kebutuhan yang di perlukan mendesak 100 hari ke depan maupun satu tahun dan lima tahun. Akhirnya ditutup di tahun 2014 melalui ekspansi yang organik dan non organik untuk usaha mikro dan koperasi khususnya berkaitan dengan *micro finance*. Ada 75 ribu lembaga keuangan mikro di seluruh Indonesia tumbuh berkembang secara pesat dan ini perlu suatu payung hukum, oleh karena itu kita betul-betul ingin teman-teman di Komisi VI bisa menggolkan RUU Lembaga Keuangan Mikro paling tidak satu tahun ke depan, karena ini sudah dicoba dua kali didorong, kalau tidak salah terakhir 2005 tapi belum berhasil menjadi Undang-Undang, ini sangat dibutuhkan oleh lembaga keuangan mikro agar mereka memiliki payung hukumnya.

Slide berikutnya, ini konsep kita bahwa pemberdayaan mikro ini bukan hanya memberikan ikan tapi juga harus memberikan suatu *know how* atau *knowlege*, dan kita juga harus memberikan bukan hanya kailnya bukan hanya perahunya tetapi juga kita harus bangun industrinya sehingga *linkage* usaha mikro dan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha besar itu terus terjaga, bukan hanya produk fiancial yang kita berikan tetapi juga aspek sosial ekonominya, dan kita ingin juga bahwa *social responsibility investors*

melalui CSR melalui gerakan-gerakan lembaga keuangan mikro lain bisa mendorong pemberdayaan UMKM, lima tahun ke depan.

Ada satu aspek yang kita dorong juga yang menjadi national summit itu revitalisasi pasar tradisional, karena teman-teman mikro ini butuh sekali kepastian lahan usaha mereka, dengan adanya kepastian lahan usaha mereka Insya Allah mereka bisa lebih memiliki kepastian dalam berusaha setelah dibantu juga oleh kreditnya atau *micro finance*.

Untuk pengembangan kecil menengah dan ini juga mencakup koperasi lima tahun ke depan itu adalah: pertama, tentunya adalah lingkungan bersih yang kondusif itu yang kita inginkan, melalui *governance* dan melalui *policy* yang *formulation* yang baik, struktur yang sportif akhirnya di tahun 2014 harapan kami brand-brand nasional indonesia sudah bisa go regional atau go international. Mimpi kami di KADIN bukan hanya di Mc. Donald atau Pizza Hut yang ada di Indonesia tetapi juga mungkin Nasi Padang Sederhana di New York atau Ayam Suharti di London, sehingga ada Brand-Brand Nasional yang kita banggakan sanggup bersaing di pasar global.

Ini adalah kurva yang tadi saya ceritakan bahwa di kita sekarang ini ada di kwadran pertama yang sebelah kiri, dimana jumlah UMKM kita besar sekali, tapi pertumbuhan ekonomi kita belum tinggi, ini diakibatkan karena tadi mereka ini menjadi usaha mikro ini karena terpaksa bukan karena memiliki peluang, di kwadran kedua yang akan kita tuju mudah-mudahan lima tahun lagi, adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan jumlah UMKM yang turun, dan paretto 80-20 dimana 80% usaha mikro itu dan 20% usaha mikro kecil dan menengah dan besar bisa tercapai. Dengan tercapainya paretto 80-20 insya Allah pertumbuhan ekonomi kita bisa lebih berkesinambungan dan pertumbuhan yang merata atau *equitable* atau pertumbuhan yang memiliki sesuatu *level plying field* itu bisa tercapai dan saya rasa kwadran kedua ini bisa tercapai kalau kita memiliki satu kesamaan pola pandang dalam pemberdayaan usaha mikro.

Sedikit pointers dari pengembangan kecil dan menengah, kita harapkan *doing* bisnis di Indonesia meningkat terus, inovasi dan UKM yang berorientasi ekspor ini harus terus ditingkatkan agar ada asupan devisa. Kita di KADIN mengembangkan *one village one product program* kita bekerjasama dengan beberapa insitusi asing maupun institusi dalam negeri untuk program klasterisasi.

Jadi kita percaya kalau ada sistim cluster UKM ini akan lebih memiliki daya saing, lebih memiliki *capacity*, kita juga mendorong untuk peningkatan kapasitas melalui bimbingan usaha. Ini juga mendidik UKM ini agar bisa memiliki sistim keuangan yang baik, sistem managerial yang baik, UKM ini juga memiliki tentunya kemampuan untuk mengakses pasar.

Terakhir, ini yang hangat kita bicarakan kemarin sama teman-teman di Rakomas Kementerian Negara Koperasi dan UKM bersama-sama Menteri Koperasi dan UKM yang baru, bahwa KUR ini harus direvitalisasi, karena KUR ini angkanya mandeg di dua juta, tanpa ada relaksasi daripada persyaratan KUR ini kita perlu 25 tahun untuk menjangkau 50 juta unit usaha UMKM, karena totalnya 50 juta kalau sampai sekarang saja dengan gerakan yang sangat-sangat kuat hanya di dapat 2 juta, kita perlu 25 tahun lagi untuk menjangkau teman-teman yang 50 juta jumlahnya itu, ini yang kita ragukan bisa tercapai. Oleh karena itu ada keberpihakan yang jelas dalam revitalisasi KUR ini, sinergi antara KADIN dengan Komite Kebijakan KUR dimana kita harapkan, permasalahan-permasalahan yang sebetulnya sangat-sangat simple, sangat-sangat mendasar seperti BI Cheking. Kalau kreditnya cuma 5 juta kenapa harus di chek ke BI, bahwa mereka tidak diperkenankan untuk mendapatkan kredit lain seperti kredit motor atau credit card, itu sangat memberatkan mereka. Juga mereka kalau mengambil KUR tidak boleh melakukan pembayaran yang dipercepat. Seperti itu sangat-sangat kontradiktif terhadap praktek-praktek yang kita lihat di lapangan terhadap teman-teman di usaha kecil dan menengah. Ini yang kita harapkan bisa terjadi dalam 100 hari ada revitalisasi daripada KUR ini.

Berikutnya saya sampaikan matrik ini mungkin tidak bisa terbaca, tetapi intinya matrik ini, keinginan kita ada lima intinya, ada lima pilar, yaitu satu, tadi sudah sebutkan revitalisasi pasar tradisional, ini kita harapkan dalam 100 hari ke depan, ada 90 pasar tradisional yang bisa direhabilitasi dan di revitalisasi dan memberikan lahan usaha kepada usaha mikro. Lantas kita ingin ada payung hukum, pembentukan lembaga APEX dari lembaga keuangan mikro dan pengembangan kapasitas, ini kita sudah lihat di beberapa negara seperti di Bangladesh di Afrika, di negara bagian Asia lainnya, bahwa dibutuhkan suatu lembaga yang diluar sistem perbankan nasional, yang tidak perlu lagi harus terus menerus melakukan koordinasi dengan BI, karena kalau kita tidak memiliki lembaga yang diluar sistim perbankan nasional, fleksibilitas daripada lembaga APEX ini kita ragukan.

Oleh karena itu kita ingin mendorong Rancangan Undang-Undang LKM ini bisa digoalkan sehingga pembentukan lembaga APEX, payung hukum lembaga keuangan mikro ini bisa tercapai paling tidak satu tahun ke depan.

Pilar ketiga adalah Revitalisasi KUR, tadi sudah saya sebutkan revitalisasi KUR dan tentunya harapan kami ada penghapusan persyaratan KUR yang memberatkan pelaku usaha dan bukan hanya pelaku usaha yang diberatkan tetapi bank penyalur seperti BRI juga mengeluh, BRI kemaren ketemu dengan KADIN, BRI menyatakan bahwa kami ini menyalurkan 98% daripada KUR yang sekarang ini jumlahnya lebih dari 2 juta. Tetapi kami terhambat karena persyaratan itu yang memberatkan event BRI yang menyalurkan KUR tersebut. Selanjutnya Pilar keempat, adalah pengembangan kapasitas atau pinjam istilah kerennya *capacity building* ini ada program OVOP (*One Village One Product*) ada pembukaan akses pasar, ada program kemitraan antara baik perusahaan besar melalui CSR atau perusahaan BUMN melalui PKBL. Terakhir pilarnya adalah pilar kelima, industri kreatif dan UKM yang inovatif. Bahwa banyak yang tidak tahu diantara kita bahwa 60% produk sinemasi dunia atau produk animasi di dunia itu dihasilkan oleh talenta Indonesia. Ini sangat ironis karena kita tidak mendapatkan nilai tambahnya, karena kita tidak punya satu kebijakan tentang UKM dan inovasi dan UKM yang kreatif itu dalam satu lingkup industri kreatif yang berkesinambungan.

Jadi kita berharap di UKM ke depan untuk proposal dan program aksi ini ada beberapa terobosan seperti dukungan pemasaran di dalam dan di luar negeri, dukungan dari segi financial mengenai modal ventura, dukungan juga kepada generasi muda dalam mengembangkan industri kreatif kita kemarin sangat terenyuh, karena ada salah satu daripada anggota kami yang ingin meminjam kredit tidak besar jumlahnya tidak di dapati disini dan akhirnya mendapatkan kredit dari sebuah institusi perbankan di Singapura, dan setelah mendapatkan pendanaan tersebut itu dipatenkan di Singapura akhirnya dia sekarang menjadi *permanent residence* di Singapura.

Jadi hal-hal seperti ini yang menurut kami harus lebih tanggap kita untuk menangkap peluang tersebut. Terakhir mengenai kepastian hukum dan tentunya tentang hak cipta industri kreatif itu yang kita rasa akan menjadi hal yang sangat penting, dan mudah-mudahan lima tahun ke depan ini bisa kita sempurnakan. Tidak ada negara yang bisa besar tanpa pembangunannya tanpa kesetaraan, dan bangsa itu tidak akan besar tanpa adanya kemakmuran yang dihasilkan melalui sistim yang berasaskan keadilan, dan tidak ada ekonomi yang betul-betul maju tanpa keberpihakan kepada usaha mikro kecil dan menengah, terima kasih.

Wabilahitaufik walhidayah,

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam,
Dilanjutkan Pak silakan.

KETUA KADIN

Terima kasih Bapak Pimpinan,

Mungkin kalau diperkenankan ada beberapa asosiasi yang ikut bersama kami disini misalnya dari Asosiasi Pengusaha Makanan dan Minuman pak Thomas Dharmawan, Pengusaha Tepung Terigu pak Natsir Mansyur, dan dari Industri Logam pak Safiun, kalau ada yang mau ditambahkan pak mohon ijin.

KETUA RAPAT :

Silakan pak, silakan.

INTERUPSI :

H. MUKHAMAD MISBAKHUN, SE / F-PKS:

Pimpinan maaf,

Pimpinan mohon karena, maaf, karena asosiasinya banyak mohon waktunya diatur berapa menit per asosiasi, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Baik pak karena waktunya juga sore, barangkali dipercepat, mudah-mudahan bisa 5 atau 10 menit mungkin supaya bisa terakumulasi semuanya, silakan pak.

KADIN :

Terima kasih pak.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat sore dan salam sejahtera pak, saya Thomas Dharmawan, saya di Kadin sebagai Ketua Komite Tetap untuk Industri Makanan, Minuman dan Tembakau, jadi urusan tembakau diserahkan ke kami pak juga. Tetapi saya sebagai Ketua Umum dari Gabungan Perusahaan Makanan dan Minuman.

Selama ini industri makanan beberapa bahasan pokok sudah masuk dalam roadmap kami pak, tetapi banyak sekali hal-hal yang memang tidak dibahas secara detail pak, karena kami juga melihat selama 5 tahun ke depan ini, kelihatannya DPR juga perlu melihat apa yang terjadi pada industri makanan dan minuman. Pemerintah sendiri kelihatannya melihat makanan penting pak, karena hampir 50% daripada konsumsi masyarakat Indonesia itu untuk makan pak, yang kira-kira nilainya hampir 1700-1800 triliun untuk makan orang Indonesia pak. Dari jumlah itu pak dari kira-kira 1600, kira-kira 35% yang diolah oleh industri pengolahan makanan dan minuman, itu termasuk industri di tambah rokok pak, rokok itu kira-kira 10% kira-kira 100 triliun adalah untuk Rokok. Nah kami juga melihat bahwa Industri ini berkembang cukup baik dari tahun ke tahun meningkat, tetapi seperti yang disampaikan oleh pak Benny, masalah harmonisasi tarif juga kelihatannya juga menjadi isu yang dihadapi oleh kami pak.

Umpamanya begini pak, kalau kita ingin melindungi petani gula, maka bea masuk gula, karena kita terpaksa masih harus masih mengimport, harus lebih tinggi dibandingkan kalau kita mengimport permen. Nah masalah-masalah seperti itu juga menghambat pak, karena bagaimanapun juga kalau import permen lebih mudah masuknya ke Indonesia, maka industri pengolahan permen di Indonesia akan menjadi kesulitan, tidak hanya karena gulanya demi untuk melindungi petani, tetapi juga kemasannya pak, ya kemasan plastiknya, karena industri hulunya harus dilindungi juga. Industri kaleng kalau ikan dalam kaleng harus *thin platenya* harus di Indonesia, jadi ini adalah masalah yang cukup lama atau beberapa tahun dibahas tetapi memang perlu satu wisdom yang bagaimana kita kerueforia itu yang pertama pak, jadi masalah harmonisasi tadi sudah disampaikan tapi pointnya kita ingin bahwa industri kita berkembang, karena jumlah industri pangan kami itu mempekerjakan lebih dari 3,5 juta orang, jumlah orangnya lebih dari 3,5 juta. Tapi strukturnya juga berbeda seperti tadi pak Sandi nyampaikan ada yang besar, ada yang menengah, ada yang kecil, dan ada yang industri rumah tangga, justru yang paling besar adalah industri rumah tangga.

Yang kedua yang ingin kami sampaikan juga masalah tadi bu Ratna juga mengenai bahan baku, karena sebagian besar dari bahan baku kita juga masih ada ketergantungan dari luar karena kita bisa memproduksi seperti susu bubuk, daging, yang kemudian kedelai, kemudian juga gandum, kami berharap dengan sport dari pemerintah dan dari parlemen, bahan baku yang sekarang itu masih diimport, mungkin dalam tempo sekian tahun itu bisa di produksi di dalam negeri pak. Ini harapan kami, nah untuk itu memang memerlukan beberapa bantuan-bantuan seperti mempercepat soal masalah lahan untuk perkebunannya, masalah pendanaannya yang relatif lebih murah, karena suku bunga di Indonesia itu jauh lebih mahal dibandingkan dengan Malaysia atau dari negara lain.

Kemudian yang ketiga pak, yang ingin saya sampaikan adalah mengenai pengawasan juga. Industri ini memerlukan semacam inovasi, memerlukan semacam research. Kita juga sudah mengharapkan bahwa semua *research* dan inovasi diarahkan kepada pangan khususnya untuk UKM tadi. Kami juga menghadapi kendala karena industri pangan itu industri yang sangat diregulasi pak, jadi saat ini itu ada hampir itu untuk keamanan pangan itu ada 9 kementerian yang menangani soal pangan pak. Untuk bahan baku pertanian ditangani oleh Menteri Pertanian, bahan baku perikanan ditangani oleh Menteri Kelautan, bahan baku madu itu Menteri Kehutanan, nanti urusan pengolahannya Menteri Perindustrian, kalau itu nasi goreng diurus oleh Menteri Kesehatan, kalau itu masalah halal Menteri Agama ada juga Badan POM. Nah ini memang membuat saya terpaksa harus berkoordinasi dengan hampir semua kementerian yang menurut saya juga sebenarnya kalau itu bisa ada satu atap seperti ada Dewan Ketahanan Pangan yang diketua oleh Presiden itu bisa diefektifkan dengan lebih baik pak. Nah ini kira-kira kegiatan seperti ini juga menjadi kegiatan yang sebenarnya kita harapkan didalam Kabinet Indonesia Bersatu Kedua ini mendapatkan perhatian lebih serius.

Yang terakhir juga masalah isu pak industri pangan itu tidak terlepas dari isu-isu yang ingin saya sampaikan, bahwa isu-isu ada mengandung formalin mengandung melamin, ada flu burung dan lain-lain. Itu yang membuat konsumen kita juga agak sedikit khawatir pak. Nah positifnya bahwa kalau isunya ditiupkan menjadi demikian besar maka konsumen takut pak, dia lebih percaya pada barang-barang yang diimport ini, juga menjadi hal yang menurut saya juga perlu mendapat perhatian kita semua. Yang terakhir adalah bahwa kita juga menghadapi masalah mengenai pendaftaran karena isu-isu ini biasanya juga diikuti dengan operasi yang dilakukan di daerah-daerah apakah oleh balai POM, dinas karantina, apakah

oleh dinas-dinas tertentu, sehingga seringkali bahwa ini membuat cost dari pada produk kita itu bisa lebih mahal, karena biaya distribusi dan perijinan tadi, saya pikir hal-hal seperti inilah yang mungkin ingin yang saya sampaikan secara singkat tapi nanti secara umum didalam roadmap itu sudah ada pak, nanti kami juga ingin masukan kepada anggota yang terhormat untuk sebagai masukan-masukan didalam rapat yang lebih khusus. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan, terima kasih untuk bapak dan ibu para wakil kita .

KETUA RAPAT:

Terima kasih selanjutnya diteruskan, silakan ibu.

KADIN / RATNA SARI LOPES:

Terima kasih,

Saya Ratna Sari Lopes dari Asosiasi Produsen Terigu Indonesia, juga di komisi tetap industri makanan minuman. Saya ingin menyampaikan bahwa didalam kedepan itu menghadapi globalisasi kita adalah perang kebijakan antar negara dimana semua tarif sudah menjadi 0%, ada isu anti dumping yang akhir-akhir ini kita kurang-kurang begitu men *support* karena apa kita di luar negeri kita dituduh 165 kasus, kita sendiri di Indonesia hanya 14 kasus, jadi kalau lihat angka disini kita sangat lemah menggunakan tools yang mengatur *unfair trade* didalam WTO, kami industri dalam negeri menginginkan komitmen yang kuat dari pemerintah maupun seluruh kelembagaan yang ada agar dapat melindungi industri dalam negeri dari praktek curang yang sudah diatur dalam WTO. Kemudian isu anti dumping selalu timbul karena adanya persetujuan atara industri dalam negeri dan importir seyogyanya kepentingan industri dalam negeri dikedepankan mengingat kontribusinya jauh lebih besar ketimbang importir. Selanjutnya mungkin saya ingin mengenai gandum ya pak ya, kita tahu bahwa gandum 100% memang masih import, tapi kami juga 10 tahun terakhir ini kami mengembangkan menjadi gandum tropis dan itu sudah berhasil dan sudah menghasilkan bibit tapi selalu masih menjadi paradigma bahwa gandum adalah tanaman sub tropis. Padahal sebenarnya bisa ditanam di Indonesia tapi sayangnya Departemen Pertanian sendiri juga mengalokasikan anggaran untuk pengembangan gandum ini sendiri, padahal kita tahun bahwa trendnya itu selalu naik. Siapa sekarang perhari yang gak makan terigu apakah itu dalam bentuk mie apakah itu dalam bentuk roti.

Tapi yang ingin saya tekankan adalah, seyogyanya gandum juga menjadi perhatian kenapa agar kita itu paling sedikit perlahan kita mengurangi ketergantungan 100 % import. Karena gandum bisa ditanam di Indonesia dan di jaman Belanda pun juga sudah ditanam di Indonesia, kita tahu dari jaman dulu kita sudah makan terigu ya itu adanya mie jawa misalnya ya, dan kami harapkan. Karena kedepan kebutuhan gandum di Indonesia pertahun 5 juta ton, sepuluh tahun kedepan saya prediksi akan menjadi 10 juta ton, dan sekarang player sudah mulai banyak dari 4 sekarang akan menjadi 20 player. Jadi kami harapkan perlindungan industri dalam negeri ini kami mendapatkan komitmen yang kuat agar Kadi itu dijadikan satu lembaga yang tadi pak Beni katakan bahwa apabila dikemudian hari Kadi merekomendasikan sudah tidak perlu lagi dikaji ulang kenapa, karena didalam komisi anti dumping Indonesia itu sendiri juga sudah ada *board of members* nya terdiri dari 8 eselon 1 dari departemen-departemen, terima kasih pak.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya pak Syafiun / Kadin.

KADIN / SYAFIUN:

Salam sejahtera untuk kita semua,

Saya nanti hanya diakhir penyampaian mengenai deindustrialisasi ini akan kami, sekilas akan saya kupas mengenai logam. Jadi saya ingin menjelaskan mengenai deindustrialisasi ini. Peran industri manufaktur didalam menciptakan nilai tambah mencapai puncaknya pada tahun 2004 dengan kontribusi 28,1% pada PDB, sejak itu perannya terus turun hingga tinggal 27,1% pada tahun 2007, dan sedikit meningkat menjadi 27,9% pada tahun 2008. Penurunan peran akan terus berlanjut sejalan dengan pertumbuhannya yang lebih rendah dengan pertumbuhan PDB. Dapat dikatakan bahwa perekonomian di Indonesia mengalami proses deindustrialisasi dini, peran sektor industri manufaktur biasanya mengalami penurunan setelah mencapai 35% dari PDB. Perekonomian mulai bergeser kesektor jasa-jasa terutama jasa modern dipertkotaan yang kurang menyerap tenaga kerja. Bila terus berlanjut pengangguran akan menjadi semakin besar.

Penyaluran kredit perbankan ke sektor industri secara nominal tetap tumbuh namun persentasenya makin rendah. Pada tahun 1985 hampir 40 % kredit perbankan disalurkan ke sektor industri pengolahan, pada tahun 2008 industri manufaktur hanya memperoleh 16 % dari kredit perbankan. Perbankan lebih tertarik pada pembiayaan konsumsi dan pembangunan properti. Penurunan volume kredit perbankan berarti kelangkaan investasi dan modal kerja bagi sektor industri. Mengenai ekspor produk industri, walaupun makin menurun pangsa produk hasil industri dalam total ekspor non migas masih sangat dominan. Pada tahun 2008 dari 108 milyar US dollar ekspor non migas 82 % diantaranya berupa produk hasil industri karena perannya yang sangat besar, perkembangan ekspor produk industri sangat berpengaruh pada perkembangan ekspor secara keseluruhan. Pada lima tahun terakhir tahun 2004 sampai 2008 ekspor produk industri tumbuh rata-rata 16,7% pertahun. CPO, tekstil, garmen, karet olahan produk kayu dan alat listrik merupakan kontributor utama pada ekspor produk manufaktur lebih dari separuh ekspor. Ekspor produk manufaktur terdiri dari produk-produk tersebut diatas. Rasio bahan baku impor terhadap ekspor produk industri cukup tinggi. Pada 2008 impor bahan baku industri mencapai 45 milyar dollar, 45,3 milyar berupa barang setengah jadi pada tahun yang sama produk industri sebesar 88,4 milyar. Rasio impor bahan-bahan baku terhadap total ekspor lebih dari 50 % ini yang mengenai penurunan di industrialisasi.

Saya ingin sedikit mengupas mengenai bahan baku industri, struktur industri. Akan kami kemukakan kendala, kemudian harapan sebenarnya, terus kemudian masalahnya berada dimana kemudian didalam tayangan yang tadi itu pak disebutkan juga jadwal yang kita usulkan dari saat ini. Jadi bahan baku struktur industri, penambahan kapasitas pengilangan minyak didalam negeri tidak mengekspor minyak mentah, yang sampai sekarang ini penambahannya masih belum sempat terjadi. Kendala industri hulu lemah, bahan baku dan bahan penolong terbatas, kurang terintegrasi, tarif kurang harmonis, harapan kita adalah integrasi industri hulu yang kuat sehingga tercipta produk ekspor yang bernilai tambah tinggi, bahan baku dan barang modal tersedia dengan harga bersaing. Nah rincian yang kita sampaikan kebijakan DMO dan pengembangan potensi sumber daya alam yang berpotensi sebagai bahan baku tidak mengekspor bahan mentah saja. Mendorong gairahnya investasi yang menghasilkan produk antara untuk mengurangi impor bahan baku.

Kedua, menghapus hambatan importasi mesin bekas untuk penggunaan sendiri oleh perusahaan industri, revisi KMP No. 46 Mendag/PER/12/2007. Tindakan tegas bagi para penyelundup sumber daya alam, kayu ikan, pupuk, dan lain-lain. Perlindungan atas hak pengelolaan HTI yang diberikan penetapan pajak ekspor produk-produk mentah dan bahan baku membuka impor plastik resin dan scrap plastik revisi Menperdag No.230/231 tahun 1997.

SUKUR H. NABABAN / F-PDIP:

Instruksi Ketua dari pada dibacakan bagus makalahnya dikasih ke kita lebih banyak diskusinya pak ketua.

KADIN:

Nah ini sebentar lagi pak, Meninjau kembali kebijakan ekspor scrap logam dan rotan, pembebasan PPN atas bahan baku perak, crumb rubber sheet, dan crebb, insentif bagi pembangunan industri pendukung, penyedia bahan baku termasuk bentuk inkind. terima kasih.

KETUA RAPAT:

Demikian sudah saya kembalikan sudah cukup pak.

KADIN:

Sebetulnya ada dua lagi, tapi ini hanya berupa penyampaian saja sedikit 3 menit, 3 menit mungkin pak dari tepung terigu sama dari gabungan pengusaha elektronik.

KETUA RAPAT:

Ok, saya mohon waktunya mungkin bisa disampaikan.

KADIN:

Terima kasih pak Agus,
Pak pimpinan yang kami hormati bapak-bapak Anggota DPR-RI,

Saya tidak banyak pak jadi karena perintahnya pak Agus ada beberapa hal yang ingin sampaikan kepada bapak. Kaitan dengan secara politik bahwa perlu ada suatu namanya *national interest*, Indonesia itu tidak mempunyai *national interest* terhadap suatu produk-produk komoditi, makanan kita 65 % impor, bahan baku kita untuk komoditas industri mesin logam dasar kira-kira 70 % impor. Kita tidak punya industri pengolahan tembaga, kita tidak punya industri pengolahan besi, krakatau steel tidak bisa diharapkan untuk kedepan itu loh pak. Saya minta kepada DPR mungkin barangkali kita satu fokus untuk beberapa industri yang berat yang kita bisa untuk *national interest* itu gitu loh pak. Yang lainnya bahwasanya tadi mengenai distribusi sesuai bidang kami bahwa, perlu kami informasikan kepada bapak sekalian, bahwa sekarang ini didunia ini bagaimana mengefisiensikan distribusi barang dan logistik. Indonesia adalah negara kepulauan yang mempunyai garis satu pulau ke pulau lain mempunyai biaya produksi angkutan yang sangat tinggi sekali, harga gula misalnya katakanlah dari Jakarta bisa kita capai 10.000 tapi begitu bicara di Merauke bisa mencapai 20.000. Ini perlu menjadi perhatian bagi kita sehingga distribusi komoditas apapun di Indonesia bisa kita murah gitu, tapi oleh pemerintah ini tidak bisa diabaikan gitu, karena Aceh dengan Merauke sama status kenegaraannya, sama status hak pilihnya gitu lho, tapi Orang Aceh dengan Orang Jakarta, Orang Jakarta bisa membeli gula 10 ribu, tapi orang Merauke membeli gula dengan 20 ribu, ini bagaimana caranya kita anukan. Memang dulu ada teknologi namanya, waktu telepon masih pakai kabel bisa kita *cost*-nya tinggi, sekarang telepon sudah pakai satelit jadi kan tidak ada masalah gitu loh Pak. Nah ini bisa menjadi pemikiran bagi teman-teman yang ada di DPR. Nah saya kira yang lain masalah kalau sesuai dengan bidang kami masalah asosiasi pengusaha gula dan terigu mungkin lebih banyak yang lebih tahu di teman-teman yang ada di DPR sini, tapi mungkin kita harapkan ke depan ini manajemen pergulaan nasional masih kita bisa harus perlu kita benahi, karena di depan mata kita ini gula kan mendapat harga mencapai kira-kira bisa sampai 15 ribu kalau kita tidak siap gitu.

Oleh karena itu kita minta kepada ke depan ini teman-teman untuk bisa membahas lebih detil lagi masalah pergulaan tentunya, saya kira itu saja.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Nasir Mansur.

Ini alumni Komisi XI ini Pak, jadi mungkin sudah paham sekali.

Silahkan selanjutnya terakhir ini.

KADIN / ALI SUBROTO:

Terima kasih.

Nama saya Ali Subroto, saya Ketua dari Gabungan Elektronika. Pada dasarnya permasalahan di industri elektronika telah dicover dari apa yang telah disampaikan oleh Pak Beni Sutrisno tadi, yaitu mengenai iklim usaha yang tadi disebutkan ada 12 unsur di sana. Namun untuk industri elektronika, kami membutuhkan prioritas kepada 3 unsur utama yaitu yang pertama adalah masalah pasar, yang kedua tenaga kerja, dan yang ketiga adalah pendanaan, bukan yang lainnya tidak penting, tetap penting tapi 3 ini adalah yang paling utama buat industri elektronika, mengapa? karena industri elektronika itu secara umum kurang sehat, dan kami melihat bahwa ketidaksehatan industri elektronika itu atau usaha elektronika karena suplai-nya selalu lebih banyak daripada kebutuhannya. Kebutuhannya tetap tumbuh namun suplai-nya itu lebih besar daripada kebutuhannya, sehingga margin daripada industri tersebut itu menjadi sangat tipis sekali, dan mungkin banyak juga yang beberapa pelaku yang melakukan *dumping* di sana itu. Oleh sebab itu kami telah meminta kepada Departemen Perdagangan dan Perindustrian juga untuk menjalankan yaitu standarisasi dan kebijakan untuk memberlakukan kebijakan label, artinya adalah memasang hambatan-hambatan bagi untuk produk impor dan domestik, namun dengan hambatan tersebut itu tentunya lebih menguntungkan bagi industri dalam negeri. Dengan langkah tersebut tentunya diharapkan pasar dalam negeri ini bisa diisi oleh industri dalam negeri di sana. Nah ini kami harapkan kiranya bisa dipercepat karena exses ini kami mendengar ada hambatan karena pembangunan laboratorium ujinya itu masih menunggu dari pada dana daripada APBN, dan mutu label mungkin juga masih sedang diproses di Departemen Perdagangan.

Dan yang kedua adalah mengenai masalah KPPU, mungkin perlu ditingkatkan khusus untuk industri elektronika, karena bagaimanapun juga saya rasa pasar daripada industri elektronika ini perlu disehatkan, karena kalau katakan marginnya tipis, untuk membayar listrik lebih mahal, membayar infrastruktur lebih mahal itu akan sangat sulit sekali, kalau kita bandingkan dengan industri makanan, mungkin marginnya lebih bagus, jadi pasarnya tumbuh, sehingga untuk mampu untuk *men-absorb* daripada ketidak efisienan tersebut.

Yang kedua adalah masalah tenaga kerja. Sebagaimana kita ketahui bahwa elektronik termasuk padat karya. Nah masalah tenaga kerja ini seharusnya kita harus membahas di dalam Undang-Undang No.13 ini saya rasa ada satu point yang paling krusial yang mungkin belum pernah kita bahas bersama, permasalahannya adalah, perusahaan itu diwajibkan untuk menyediakan dana untuk suatu kompensasi yang kita sebut *future value* yang tidak jelas. Nah itu tidak bisa di-*manage* oleh perusahaan, sehingga perusahaan tidak bisa menggunakan tenaga kerja untuk jangka panjang, dan akibatnya adalah tenaga kerja skillnya itu tidak bisa kita tingkatkan, karena otomatis perusahaan akan menggunakan kontrak, banyak yang menggunakan kontrak dalam hal ini, karena ya masalahnya sulit untuk menanggung mengenai apa itu yang disebut dengan kompensasi daripada *future value*. Jadi kami rasa *review* daripada Undang-Undang No.13 ini adalah sangat dibutuhkan di sana itu.

Dan yang ketiga tentunya dalam masalah pendanaan, karena memang secara umum industrinya kurang sehat, wajarlah kalau pihak daripada perbankan itu kurang mendukung, namun kami lihat mengingat bahwa industri elektronika itu mempunyai kontribusi ekspor yang cukup besar dan tenaga kerja juga banyak, kemudian juga pengembangan teknologi juga sangat baik di dalam industri elektronika tersebut. Oleh sebab itu kami mengharapkan bahwa baik pemerintah dan DPR bisa bersama-sama membantu untuk mengarahkan kepada perbankan bisa mendukung agar supaya industri elektronika ini bisa cepat lebih maju. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Bagaimana Pak waktu cukup ya?
Masih ada lagi.

KADIN:

Cukup Pak, mungkin bisa dimulai dengan pendalaman Pak.
Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, Bapak/Ibu sekalian yang saya hormati.

Demikian pemaparan dari Kamar Dagang dan Industri. Untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab dan pendalaman materi yang pertama kali dari sisi sebelah kiri, Pak Idris Laena kami persilahkan.

Ir. H. M. IDRIS LAENA/F-PG:

Terima kasih Pimpinan.

Saudara-saudara Anggota Dewan yang saya hormati.
Rekan-rekan Pengurus Kadin yang saya hormati.

Saya langsung ke Bung Sandi saja. Saya tertarik sekali dengan pemaparan Bung Sandiaga Uno tadi, seolah-olah sedang mendengarkan paparan dari Menteri Koperasi dan UKM, soalnya lengkap dengan *time schedule*-nya Pak, *time schedule*-nya 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 tadi. Kalau ini dilaksanakan, saya kira kita akan menghadapi struktur perekonomian Indonesia yang berbeda yang tentu sudah berbasis kepada UKM. Yang menjadi masalah saya begini Pak Sandi, bagaimana ini bisa diimplementasikan? Karena 70% tadi kebijakan itu kebijakan program tadi itu adalah sebetulnya kebijakan-kebijakan pemerintah yang Bapak sampaikan itu. Andaikata program ini bisa dilaksanakan dan bisa disinergikan dengan Menteri Koperasi dan UKM, saya kira luar biasa, karena saya sependapat betul, pemerintah telah menganggarkan dalam 5 tahun ini sekitar 100 triliun untuk anggaran UKM tapi bagaimana pun caranya tanpa pelatihan misalkan seperti yang Bapak sampaikan tadi saya kira percuma tidak akan pernah terlaksana karena anggaran tahun lalu saja yang terserap itu hanya saya tidak tahu lupa apa 4% apa 14% dari 20 triliun, karena memang tidak mungkin perusahaan usaha kecil menengah bisa mengajukan punya akses kepada perbankan meski dalam bentuk skema KUR (Kredit Usaha Rakyat).

Yang kedua Pak Sandi malam ini kami mau rapat kerja dengan Menteri Koperasi, barangkali ada masukan tentang khususnya menyangkut kebijakan dan regulasi, sehingga kita bisa eksplor karena begini saya tadi siang juga diskusi dengan teman-teman, anggaran untuk Kementerian Koperasi UKM ini hanya Rp.700 miliar, sementara usaha kecil menengah yang akan dibina itu mencapai 51 juta. Simpel saja deh kalau orang berpikir sederhana kalau Rp.700 miliar dibagi 51 juta perusahaan, artinya sama dengan hanya Rp.14 ribu dana anggaran pembinaan bagi setiap usaha kecil menengah, mustahil Pak. Sementara bebannya tadi disampaikan bahwa 90% dari penyerapan dari tenaga kerja kita justru dibebankan kepada usaha kecil menengah ini. Mohon jawabannya, saya kira itu.
Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Selanjutnya Pak Iskandar Syaichu.

H. ISKANDAR D. SYAICHU, SE / F-PPP:

Terima kasih Pimpinan.

Anggota Komisi VI yang saya hormati.

Bapak-bapak Pengurus Kadin Indonesia yang saya muliakan.

Pertanyaan saya mungkin berkisar UMKM, jadi saya peruntukan untuk Pak Sandi lagi. Begini Pak Sandi, masalah utama yang dihadapi UMKM sebenarnya selain pendanaan ya kan satu pendanaan, pengelolaan dan pemasaran. Lainnya masalah yang mendasar bagi pengembangan UMKM seperti saya sebutkan tadi akses permodalan dari bank dan sulitnya memasarkan hasil produksi. Sekali lagi saya pikir perlu komitmen bank untuk membantu dengan cara mempermudah persyaratan, sedangkan untuk promosi produk perlu dibikin *trading house*, *trading house* yang idealnya dibikin di setiap provinsi seperti di Jepang Pak, India maupun di China. Jadi saya berpikir omong kosonglah kalau kita ini berorientasi ekspor karena posisi tawar UMKM kita tidak ada, yang terjadi selama ini hanya bisnis para pengepul yang dibawa keluar negeri. Kita memang bersyukur Pak, pemerintah sudah berencana untuk menyalurkan kredit usaha rakyat lebih dari Rp.20 triliun per tahun. Saya ingin tahu langkah-langkah yang diambil Kadin Indonesia dalam upaya menolong Anggota Kadin-Kadin didaerah yang sebagian besar usaha menengah dan kecil Pak. Saya ini kebetulan Dapil saya di Gresik Lamongan Pak, saya Jawa Timur X. Banyak pengusaha di sana di Gresik dan Lamongan terutama yang bergerak di bidang sektor maritim, di bidang pengalengan ikan itu kurang mendapat sambutan yang baik dari kalangan perbankan. Padahal saya pikir sektor ini sangat bagus untuk ekspor. Jadi sekali lagi saya mohon Kadin juga memiliki rasa keinginan yang kuat untuk menolong pengusaha-pengusaha menengah ke bawah. Saya pikir pertanyaan saya cukup sekian Pak. *Assalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Selanjutnya Pak Dodi.

DODI REZA ALEX NOERDIN LIC ECON, MBA./F-PG:

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh.

Bapak Pimpinan, Anggota-anggota Komisi VI yang saya hormati.

Serta seluruh kawan-kawan Pimpinan Anggota HIPMI dan Kadin Indonesia.

Saya tertarik Pak mengenai ulasan tadi mengenai *free trade agreement*. Saya setuju mengenai *free trade agreement* harus kita *review*, tapi yang paling penting adalah tentunya kita tidak bisa menahan serbuan globalisasi dalam perdagangan. Jadi harus kita kuatkan di sini adalah menguatkan industri dalam negeri dan juga tadi sempat disebut memberdayakan kembali lembaga-lembaga yang mengatasi anti dumping ataupun serbuan KADIN tadi menjadi *trade defence system* yang lebih berdaya guna. Saya ingin menggabungkan dengan presentasi sebelumnya mengenai 10 cluster industri unggulan. Di sana disebutkan bahwa ada beberapa cluster industri unggulan diantaranya itu industri hasil yang untuk menambah devisa, itu industri hasil perkebunan. Kita tahu bahwa kita adalah negara penghasil CPO. Nah dalam perkembangannya dalam rangka untuk lebih memberdayakan industri dalam negeri dalam menghadapi serbuan produk-produk asing dari luar negeri.

Kita saya pikir dan juga mungkin dari teman-teman Kadin setuju bahwa kita harus mengembangkan industri turunan dari CPO tersebut. Jadi industri derivatif dari CPO tadi kita kembangkan dan kita *manufacture* di Negara kita untuk kita ekspor kembali dari 67 produk industry olahan, industri turunan dari CPO yang hanya sekarang di produk di Indonesia hanya mencapai sekitar 30. Saya pikir ini tadi bagian daripada untuk mengimbangi tadi yang disebutkan oleh Ibu tadi mengenai serbuan bahan baku dari luar untuk pengolahan makanan dan sebagainya, dimana kasus yang sekarang kalau tidak salah ada yang kita tuduhkan Anti Dumping dari Turki mengenai tepung terigu dimana kita lihat bahwa dijelaskan bahwa kita menuduh kita bahwa mereka menjual lebih murah dari negara mereka, tetapi mereka berdalih produk yang di jual di Indonesia adalah yang untuk mie berbeda di negara asal yang mereka jual untuk roti. Nah kalau misalnya industri ini yang kita punyai yang punya banyak bahan baku dalam negeri seperti yang saya sebutkan tadi industry CPO, kita kembangkan industri turunannya, sehingga menjadi industry derivatif yang bisa kita jual kembali keluar negeri, ini secara otomatis tentunya membendung, mengurangi akan

serbuan masuk produk-produk asing di Indonesia. Nah untuk itu mungkin dalam Rapat Dengar Pendapat Umum ini, sebagai Kadin yang Ketua Umumnya adalah Menteri Perindustrian kita, industry hilir dari kelapa sawit tadi saya pikir perlu didorong pak, jadi salah satunya adalah tentu menerapkan zona ataupun klaster-klaster dari industry hilir kelapa sawit, yang tentunya kita lihat potensi dari daerah-daerah yang mana sudah ada perkebunan ataupun bahan bakunya yang selama ini memang sudah melimpah. Karena banyak Produk-produk kelapa sawit kita sekarang berbentuk raw material, tadi disini CPO nya yang kita jual ke luar negeri tetapi kembali, banyak sekali aturan-aturan dari luar negeri yang memberatkan para produsen kelapa sawit, keikutsertaan kita dalam RSPO dan lain sebagainya itu adalah mungkin adalah sebagai topeng dari Negara yang kita ekspor untuk menyetir ataupun mengatur harga maupun produksi dari kelapa sawit kita disini. Apabila tadi industry kelapa sawit, industry hilir bisa kita kembangkan di Negara kita, saya yakin ketakutan akan produk-produk asing yang akan masuk perdagangan bebas maupun hasil ekspor kita di luar bisa menyaingi produk luar negeri saya yakin bisa terlaksana.

Demikianlah mungkin dari pihak Kadin tentunya akan serius untuk mendorong hal tersebut, kami juga di DPR Insya Allah akan tetap membantu dalam menghadapi perkembangan perdagangan dunia, maupun produk penguatan industry dalam negeri, sekian, terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabaraktuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam selanjutnya pak Misbakhun

H. MUKHAMAD MISBAKHUN, SE / FPKS

Terima kasih Pimpinan,

Rekan-rekan Komisi VI yang saya hormati, pengurus Kadin yang saya hormati,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabaraktuh.

Saya kebetulan juga anggota Kadin pak, anggota tapi bukan pengurus tapi didaerah. Adalah hal yang luar biasa saat ini saya melihat Kadin. Saya mengucapkan selamat pak, karena apa Roadmap nya kadin menjadi suatu program nasional jadi sangat luar biasa diawal Rapat Komisi VI katanya dipakai 80% dari Roadmap kadin itu sebagai program ekonomi nasional, yang 20% pengantar surat kata Ketua Komisi saya itu. Jadi ini adalah suatu tantangan yang luar biasa ketika roadmapnya kadin itu menjadi program ekonomi nasional, kadin sebagai pelaku usaha membuat program yang harus dijalankan oleh pemerintah, di drive oleh kadin saya tidak tahu nantinya jadinya seperti apa negara saya. Mudah-mudahan menjadi lebih baik karena saya mengatakan, pelaku usaha menjadi pemikir, kemudian memberikan pemikirannya itu harus dijalankan oleh pemerintah dan mereka harus menjalan kalau sampai 5 tahun kedepan ini tidak jalan, saya tidak tahu siapa lagi yang harus dipersalahkan, saya tidak tahu siapa yang harus dipersalahkan ini refleksi yang luar biasa apalagi menterinya pak itu akan menjadi menteri yang akan mendrive industrialisasi yang selama ini mengalami penurunan yang luar biasa, dan saya lihat paparannya pak Benny tadi time table nya juga jelas, sasaran yang dituju juga jelas semuanya sudah sangat jelas, tinggal bagaimana nanti beliau sebagai menteri tinggal menjalankan itu saja pak.

Kemudian saya sebagai, konsekuensi dari itu semua, saya melihat ada begini pak, ini juga refleksi dari yang ingin saya sampaikan. Kadin ini suatu organisasi yang banyak memberikan dan memfasilitasi semua anggotanya untuk mengangkat isu-isu yang ada dibawah, kemudian menjadi suatu Isu nasional. Sehingga Kadin ini sangat powerfull kalau saya mengatakan sebagai suatu organisasi bisnis, ketika bunga bank naik, kadin selalu teriak harus diturunkan-diturunkan, BI menurunkan banknya tidak mau menurunkan, ketika ada permasalahan perpajakan kadin mengambil policy untuk sampai ikut ke panja kalau saya tidak salah, ikut ke panja. Semua Undang-undang perpajakan di amandemen. Nah ini kadang-kadang saya melihat ada suatu yang tidak sinkron, tidak sinkronnya apa ketika Kadin memberikan usulan-usulan tadi saya lihat ada suatu yang ideal harus ini dibangun, fasilitas ini diberikan pada saat yang sama Kadin selalu teriak bahwa pemerintah harus mendorong terjadinya iklim investasi, ketika iklim investasi ini harus didorong, harus ada dana besar yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah, sementara pemerintah harus mengumpulkan uang dari pajak, *tax ratio* kita tidak bergerak sama sekali tidak bergerak, 12%-12% lima tahun yang lalu saya ingat pak SBY itu *tax ratio* yang ditargetkan itu adalah 19%, dikoreksi di RPJM menjadi 16.5% tercapai tetap 12%-13%, tetap. PDB dirubah cara penghitungan *sizing* PDB kita membesar itu, pada saat yang sama saya mengatakan ketika usulan-usulan Kadin di akomodasi oleh pemerintah, saya sangat sederhana ketika Kadin mengusulkan stimulus salah satunya, stimulus fiskal tidak ada satu, ada stimulus fiskal untuk PPH 21 yang harus dijalankan oleh pengusaha saya yakin ini seharusnya Kadin yang mengambil.

Tapi stimulus fiskal tidak berjalan. Nah ini yang saya mengatakan ada suatu paradoksal disana, dan seharusnya menjadi refleksi yang luar biasa ini baru satu item, ada satu lagi tadi didorong adalah adanya industrialisasi atau kegiatan-kegiatan usaha didalam negeri. Contoh sederhananya pak, di Undang-undang PPN yang baru, daging dibebaskan sebagai barang kena pajak, saya mengatakan Bapak tadi menolak terjadinya liberalisasi perdagangan dan sebagainya. Kemudian mendorong suatu kegiatan ekonomi didalam negeri. Kalau begini orang tidak mau beternak, orang lebih memilih jadi pedagang. Sementara pada saat yang sama,, Bapak mengusulkan jangan sampai itu terjadi, dan ini semua saya mengatakan tidak ini lobby nya Kadin, tapi ini harusnya diwaspadai dari awal, beliau yang dulu di Komisi XI seharusnya tahu ini, yaitu daging. Dan ini membuat Negara ini akan, saya mengatakan satu sisi Bapak memberikan yang ideal kepada bangsa ini dalam bentuk Roadmap, ketika bapak mengaplikasikannya sebagai suatu individu seorang pengusaha dimana keuntungan itu harus Bapak capai, bapak berperilaku ideologinya hilang, kembali ke ideologi pengusaha.Nah ini yang harus bapak waspadai,karena apa roadmap ini akan dijalankan oleh Bangsa Indonesia.

Kemudian yang kedua, ke Pak Sandi saya mengatakan bahwa saya terima kasih atas masukannya, kita di Komisi VI akan memberikan dukungan yang penuh mengenai lembaga keuangan mikro, saya sedikit mengingatkan besok tanggal 13 itu batas akhir prolegnas, bapak bisa mengusulkan itu secepatnya, lembaga keuangan mikro karena saya secara pribadi dan mungkin akan menjadi isu bagi teman-teman lembaga keuangan mikro ini harus kita lindungi, karena apa, kita melihat sekarang banyak sekali, sejak berubahnya arsitektur perbankan Indonesia dirubah, Bank-bank Asing dengan kekuatan modal yang besar dan akses modal yang murah itu bisa masuk ke Indonesia, melalui jaringan keuangan mikro didaerah, mereka bisa mengalahkan BPR-BPR kita, baik BPR yang konvensional maupun BPR Syariahnya.Sementara mereka punya keterbatasan dalam mengakses dan ini harus menjadi concern bersama dan saya meminta kepada Ketua, untuk ini jadikan catatan menjadi prolegnas yang sangat mendesak untuk diwujudkan ditahun 2010, Lembaga Keuangan Mikro ini.

Kemudian yang ketiga, masalah liberalisasi perdagangan pak, liberalisasi perdagangan ini saya setuju dengan apa yang diungkapkan Kadin, bahwa kita dijadikan pasar oleh produk-produk impor, saya melihat dan saya juga minta dukungan Kadin ini pak, Undang-Undang perdagangan kita sampai sekarang belum selesai-selesai yang seperti bapak isukan tadi. Jadi akhirnya apa, perjanjian perdagangan international yang kita setuju dan kita bikin dengan negara manapun itu tidak mempunyai payung hukum. Payung hukum dasarnya tidak pernah kita ciptakan semuanya itu berdasarkan intuisi menterinya sendiri, , itu intuisi menterinya kalau menurut saya itu menjadi policy, dan harusnya policy itu didasarkan kepada suatu undang-undang yang sifatnya mendasar, misalnya kita mau membuat dengan Australia atau mau membikin dengan manapun, adakah hubungan timbal balik yang seimbang dan sepadan, kalau mereka bisa jual daging kepada tempat kita, apakah kita juga bisa jual daging ke Australia, jangan hanya kita dijadikan daerah tujuan saja, itu pak. Ini saya mengatakan dukungan kita kepada itu, dan Bapak mungkin harus memberi dukungan juga bahwa Undang-undang Perdagangan ini harus segera direalisasikan juga karena segera direalisasikan karena ini menyangkut hukum dasar yang kita cipta, yang harus kita buat untuk menjadi landasan, kebijakan-kebijakan dibidang Perdagangan itu yang bisa saya sampaikan, saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam,

selanjutnya Pak Nuroji,

Bapak Ibu sekalian yang saya hormati kami, saya hanya mengingatkan mungkin pertanyaan dibatasi mungkin 2-3 menit supaya waktunya juga bisa kita lampui.

IR. NUROJI / F-P. GERINDRA:

Terima kasih pimpinan,

saya singkat saja, pertanyaan saya satu saya ingin tahu sikap kadin mengenai rancangan Undang-undang Jaminan Produk Halal, yang mewajibkan produk harus mencantumkan sertifikasi halal, sementara laboratorium uji coba kita tahu belum sepenuhnya siap. Nah ini tentu akan memunculkan masalah baru, berupa antrian produk yang akan di sertifikasi juga akan banyak beredar label-label palsu, lalu apa usulan Kadin, terima kasih.